KEMENTERIAN KEUANGAN RI						
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK						

K68M0HWE

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
A.1 N	A.1 NPWP : 7 9 8 9 3 2 3 1 5 7 2 4 0 0 0								
A.2 NIK :									
A.3 Nama : JAUHARIYATUL ANWARIYAH, AMD. KEP.									
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG									
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJA		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3		B.4	B.5	B.6	B.7		
I	3 21-402-01			8.310.000	8.310.000	0	5	415.500	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota									
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 01086/LS-TJ/RSJD.AHM/2022									
Nama Dokum				en Biaya Pembayaran Tanggal 0 8 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy					
B.9	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.								
	Nomor: Tanggal dd mm								
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK									
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
-···				RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi :									
C.4	4 Tanggal		0 8	dd 0 3 mm	2 0 2 2 уууу			_	
C.5									
				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya andatangani secara elektronik.					
				dengan ketentuan yang ik sehingga tidak diperl	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	s mengatur bahwa s	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	